

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI RIAU**

Oleh :

Nelva Siskawati

(Mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi, FEB UNJA)

Abstract

The objective of this study is to analyze Total Population and Economic Growth affect regional revenue between districts / municipalities in the province of Riau. The analysis used in this study is the analysis of growth, contribution analysis and econometric analysis using panel data models.

The results showed that simultaneous Population and Economic Growth significant effect on the original income between districts / municipalities in the province of Riau.

Keywords :Local Revenue, Total Population, Economic Growth and Panel Data.

I. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menegaskan kembali pelaksanaan otonomi dengan menitikberatkan daerah Kabupaten dan Kota untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. (Citraumbara, 2004).

Menurut Kuncoro (1995) dalam penyelenggaraan otonomi daerah dikhawatirkan banyak daerah Kabupaten/Kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini dimana porsi antara Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki

Pendapatan Asli Daerah yang sangat minim dalam membiayai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15 % dari total anggaran secara keseluruhan.

Rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah, tentu akan berimplikasi pada rendahnya pembiayaan (belanja daerah) melalui anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Fakta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2012 di 12 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa kekuatan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja daerah di lima kabupaten yaitu Meranti, Rokan Hulu, Pelalawan, Kuansing dan Indragiri Hulu hanya 3% dari seluruh total belanja daerahnya. Kemudian Bengkalis, Kampar dan Rokan Hilir kekuatan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja daerah berada pada 5-6%. Selanjutnya 9-15% kekuatan Pendapatan Asli Daerahnya terdapat di Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Pekanbaru.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk

mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto juga di indikasikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini bersumber dari pajak dan keuntungan produk- produk yang dihasilkan dari perusahaan milik daerah serta pegadaian. Oleh sebab itu Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah yang secara tegas tercermin di dalam Produk Domestik Regional Bruto.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode 2001-2011. Yang kedua untuk menganalisis Struktur Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode 2001-2011. Dan tujuan terakhir adalah untuk menganalisis Pengaruh Jumlah penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode 2001-2011.

II. TINJAUAN TEORI

Kebijakan Keuangan Daerah

Sidik (2002) menyatakan, dalam rangka merumuskan kebijakan keuangan daerah, pemerintah daerah pada dasarnya akan selalu tergantung dengan Pemerintah Pusat. Daerah-daerah

tiap tahunnya selalu akan mengajukan rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya Pemerintah Pusat yang kemudian menilai, merevisi, dan mengesahkan anggaran tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tidak memiliki "otoritas" anggaran, terkecuali "otoritas" pada sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil Perusahaan Daerah. Kebijakan pola hubungan keuangan tersebut pada akhirnya dipandang sudah tidak "representatif", terhadap adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah. Karena masyarakat di daerah merasa diberlakukan secara 'tidak adil' oleh Pemerintah Pusat. Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara Pusat dan Daerah tersebut, menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan ekonomi antar daerah, kurangnya kemandirian daerah dan memunculkan ketidakpuasan masyarakat di daerah.

Struktur Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

Menurut Davey (terjemahan Amarullah, 1988), memberikan pengertian perpajakan daerah sebagai Pertama, Pajak yang

dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah itu sendiri dalam hal ini bahwa seberapa besar pajak yang dipungut langsung dari masyarakat telah ditentukan and diatur dalam PERDA. Kedua, Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh Pemerintah Daerah, Ketiga; Tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah dan Keempat; Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada kepada Pemerintah Daerah, dan dibagi hasilkan dengan atau dibebankan pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain itu Sutrisno (1984) mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu (a) Perusahaan asli daerah yaitu perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri dan (b) Perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasannya. Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud, pada dasarnya dibentuk dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan, dengan mengutamakan pembangunan daerah dengan memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan dukungan bagi ekonomi daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah

seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah dari dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mencakup berbagai jenis penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa, bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Sukirno,2004) Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Smith Menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: (a) Data Pendapatan Asli Daerah, (b) Data Jumlah Penduduk, dan (c) Data Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas dari 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dan berbagai instansi melalui data *time series* dan data *cross section*. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain : Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur/buku-buku dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Pengolahan data menggunakan aplikasi *EViews 6.0*.

Model Penelitian

Secara matematis dalam penelitian ini pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dapat digambarkan dalam fungsi sebagai berikut :

$$LnY_{it} = \alpha + \beta_1 LnX_{1it} + \beta_2 LnX_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

α : Intersep
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Parameter Pdrb Migas, Pdrb Non Migas, Jumlah Penduduk

ε_{it} : Error Term

i : Urutan Kabupaten/Kota ($i = 1, 2, \dots, 11$)

t : Series Tahun 2001 - 2011
 X_1 : Jumlah Penduduk
 X_2 : PDRB tanpa Migas
 Y : Pendapatan Asli Daerah

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Kabupaten Kampar pada tahun 2002 rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah nya berkisar 142,32 % namun di tahun 2011 mengalami penurunan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan - 4,02 %, hal ini dikarenakan hampir separoh dari wajib pajak tidak membayar pajak yang disebabkan sulitnya dalam proses pembayaran pajak dengan sistem yang berbelit-belit. Begitu pula yang dialami Kabupaten Siak, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Aslinya menurun drastis dari tahun 2002 sebesar 0,45 % menjadi -24,68 % di tahun 2011. Disamping itu penurunan terjadi akibat tidak dipungutnya retribusi peredaran hasil hutan karena pembatalan PERDA Kabupaten Siak No 36 tahun 2002 tentang peredaran hasil hutan.

Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau

Dari struktur PAD Kabupaten/Kota yang dominan memberikan

kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah adalah Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah untuk wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Ada dua Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu untuk Kota Pekanbaru tahun 2001 pajak daerah menyumbang sebesar 111,07 % dan Retribusi Daerah sebesar 119,22 %, namun mengalami penurunan di tahun 2011. Begitu pula dengan Kabupaten Siak, pada tahun 2001 kontribusi Pajak Daerahnya mencapai 85,03 % dan mengalami penurunan di tahun 2011 menjadi 18,68 %, di tahun 2001 kontribusi Retribusi Daerahnya mencapai 1156,41 % menjadi 7,55 % di tahun 2011.

Kota Dumai tahun 2001 kontribusi Pendapatan Lain-Lain Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 114,26 % dan mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi 113,17 %. Sedangkan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuansing memiliki kontribusi Pendapatan Lain-Lain Sah yang cukup besar di tahun 2001 tetapi mengalami penurunan di tahun 2011. Jika dilihat dari kontribusi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di tahun 2011, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rohul, Kabupaten Rohil dan Kabupaten Siak memiliki

kontribusi yang cukup tinggi. Secara umum, peningkatan kontribusi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kotadi Provinsi Riau

Uji F secara Simultan

Berdasarkan hasil estimasi dengan Fixed Effect Model (FEM) maka terlihat bahwa F-statistik (77.28) > F-tabel (3.49), maka H₀ ditolak, artinya variabel bebas (Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikatnya (Pendapatan Asli Daerah) pada tingkat kepercayaan 95%.

Uji t secara parsial

Dari hasil estimasi dengan Fixed Effect Model (FEM) dapat dilihat bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sedangkan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah variabel Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto non Migas) dengan t-statistik 10,36 > t-tabel 1,66 yang berarti H₀ di tolak. Hal ini berarti semakin meningkat

Pertumbuhan Ekonomi maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami peningkatan.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan Fixed Effect Model (FEM) Adjusted R-Square adalah sebesar 0.8841. Hal ini terlihat bahwa 88.41 persen Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dijelaskan oleh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan 11.59 persen Pendapatan Asli Daerah antar kabupaten/Kota di Provinsi Riau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah antar kabupaten/Kota di Provinsi Riau secara keseluruhan mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa daerah mengalami penurunan di tahun-tahun tertentu.
2. Dilihat dari struktur Pendapatan Asli Daerah untuk wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang lebih dominan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah adalah Pajak Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah, walaupun di tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup tajam. Sedangkan Retribusi Daerah masih menyumbang sedikit terhadap pendapatan Asli Daerah. Namun yang cenderung mengalami

peningkatan kontribusi adalah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah, Secara umum, peningkatan kontribusi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

3. Dari hasil estimasi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) secara parsial Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena ada beberapa daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah selain itu seperti halnya Kabupaten Inhil dan Kabupaten Kampar terjadi penurunan pertumbuhan pada komponen Pajak Daerah yang disebabkan masih kurangnya kesadaran para wajib pajak dan retribusi menunaikan kewajibannya. Namun hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa Variabel Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Saran

1. Melakukan pendataan yang lebih intensif terhadap berbagai sektor-sektor yang berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor pariwisata

seperti misalnya pendataan terhadap restoran-restoran dan hotel-hotel yang baru dibangun namun belum dimasukkan sebagai wajib pajak. Dengan demikian akan memperbaiki tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang diharapkan akan ikut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

2. Selain memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi, pemerintah setempat hendaknya juga memangkas segala anggaran yang dirasa tidak begitu perlu serta menciptakan iklim investasi yang nyaman, aman dan kondusif dengan cara mempermudah perizinan bagi investor yang ingin menanamkan modal di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
3. Variabel Produk Domestik Regional Bruto merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat mungkin bisa menjadikan daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam sebagai daerah kawasan basis industri. Hal ini di karenakan mayoritas pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2010. "Pembiayaan Pembangunan Daerah", *Graha Ilmu*, Yogyakarta, hal 69 – 109.

Ari, B. 2003. *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah*, Tesis Pasca Sarjana UNDIP, Tidak Diterbitkan

Andriani, Evi dan Handayanti, IS. "pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD kab. Merangin." *Jambi, jurnal ilmiah universitas batanghari*, 2008

Atmaja, AE dan Hendarto Drs. R. Mulyo .2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang

Azis, 1997. " *Pendapatan Asli Daerah*". Jakarta: Erlangga

Bambang J dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu*. Bogor : IPB Press

Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. *Berita Resmi Statistik Provinsi Riau No. 10/02/14/Th.XIII, 6 Februari 2012*

Brata, AG. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Budi S P dan Fuji, R R. 2002 . "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya dalam upaya

- Pelaksanaan otonomi daerah Di kabupaten kediri*”.
- Datu, K, 2003. *Analisis Kemampuan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah*, Tesis Pasca Sarjana UNDIP, Tidak diterbitkan
- Datu, K. 2012. “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar*”.Fakultasekonomi dan bisnis Universitas hasanuddin Makassar
- Davey, *Perpajakan daerah*. Terjemahan Amarullah. Jakarta.1988
- Elita , 2007.” *Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*” Rajawali
- Gujarati, DN. “ *Dasar – dasar Ekonometrika* “, Salemba Empat, Jakarta, Buku 1 dan 2, edisi 5.
- Hidayat, A. 2009.“ *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara*”, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Koswara,1999: 23. *komponen pendapatan asli daerah*. Yogyakarta.
- Kuncoro dalam Datu K, 1995.”*Otonomi daerah*”. Jakarta: fokusmedia
- Muhammad,F.2008. “ *Akuntansi Keuangan Daerah* “,Indeks, Jakarta
- NN, 2003, “ *Pendapatan Asli Daerah*” Erlangga
- Pratiwi, 2007.”*Proposi pendapatan asli daerah*”. Rajawali
- Riau, F.2011.” *Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*”.Pekanbaru: riauaksi.com
- Saragih dan Juli P. 2003.*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*.Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidik, M. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Jogyakarta.
- Sukirno, 1978. *Pertumbuhan ekonomi*”.Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985
- Syahputra H. 2007. “*Analisis Determinan PAD Kota Tanjung Balai*”, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*.www.kardin-indonesia.or.id
- Todaro, 1997.” *Pertumbuhan ekonomi*”. Jakarta
- Undang-undang No.32 tahun 2004, “*Undang-undang Otonomi Daerah*”, Jakarta, Fokusmedia, 2004
- Widjaja,2002. *Pendapatan asli daerah*.Jakarta: UI.